

INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI (Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Pendidikan)

Suwatno^{*)}

ABSTRAK

Globalisasi informasi mendorong globalisasi di semua sektor kehidupan manusia di semua negara. Hal ini juga berarti bahwa globalisasi yang terjadi akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan umat manusia baik secara individu maupun secara kolektif (bangsa suatu negara). Sendi-sendi itu antara lain bidang ekonomi dan pendidikan. Pengaruh globalisasi yang menerpa bidang-bidang tersebut merupakan sebuah ancaman namun sekaligus sebagai tantangan. Pengaruh globalisasi dapat jadi ancaman jika kita menjadi objek dari globalisasi, namun dapat jadi tantangan bila kita mau menjadi salah satu aktor globalisasi. Sudah barang tentu memerlukan strategi yang jitu untuk mencapai ke arah tersebut.

Makna Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata *globus* (Latin) yang berarti berbentuk bulat, bu-latan bumi. Globalisasi adalah keadaan menyeluruh di muka bumi, di seluruh dunia atau keragaman berpikir, berperilaku, ber-komunikasi, berpakaian dan sebagainya diseluruh dunia.

Mengutip pendapat Thomas I Friedman, seorang wartawan senior *The New York Times*, globalisasi mempunyai tiga dimensi. *Pertama*, dimensi ide atau ideologi, yaitu kapitalisme. Dalam pengertian ini, termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yaitu falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. *Kedua*, dimensi ekonomi yaitu "pasar bebas" dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. *Ketiga*, dimensi teknologi, khususnya teknolog informasi. Dengan teknologi informasi akan membuka batas-batas negara, sehingga negara semakin tanpa batas, (*borderless country*) (Sulastomo, 2000). Dengan kenyataan seperti itu, globalisasi

tidak membuka batas negara tetapi juga batas nilai ideologi, moral, warna kulit, aga-ma bahkan nilai kemanusiaan lainnya.

Akar dari globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi yang dibarengi oleh ke-majuan teknologi transportasi. Dengan ada-nya berbagai penemuan dalam bidang tek-nologi informasi, kekuasaan suatu negara dalam arti teritorial menjadi semakin kabur, karena globalisasi informasi dapat memper-pendek jarak antara satu tempat dengan tempat lainnya yang secara geografis sebe-tulnya sangat berjauhan. Teknologi yang dimaksud adalah satelit yang kemudian di-jadikan kendaraan bagi munculnya jaring-an televisi global dan jaringan internet.

Globalisasi informasi telah menciptakan desa global (*global village*) dan dunia maya. Dunia maya adalah dunia yang dipenuhi rimba raya informasi atau jalan raya yang amat luas yang penuh dengan lalu lintas informasi ke dan dari berbagai penjuru dunia (*information super high way*). Itulah pula yang disebut *cyber space* atau jaringan internet yang menyebarkan berbagai ma-

^{*)} Drs. Suwatno, M.Si. adalah Dosen Program Administrasi Perkantoran FPIPS UPI

cam informasi termasuk gambar dan grafik ke seluruh dunia dengan volume yang besar dan tingkat kecepatan yang amat tinggi (sangat aktual) serta tanpa rintangan aturan hukum, etika dan nilai budaya di manapun ia masuk (*control*).

Hal ini sangat sejalan dengan maksud pasal 19 Deklarasi Universal HAM tentang informasi yang tidak menghiraukan batas-batas kekuasaan negara (*borderless state*) dan hanya diharuskan menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain (Pasal 29 ayat 2, DUHAM). Tetapi globalisasi informasi bahkan tidak mengindahkan sekat-sekat yang ditetapkan oleh pasal 29 tersebut.

Strategi Menghadapi Globalisasi Bidang Ekonomi

Globalisasi membuat struktur ekonomi dunia kian terintegrasi. Menurut Susan Strange (1997) globalisasi ekonomi terjadi pada berbagai tingkatan (dalam Jemadu, 2000). *Pertama*, dengan mengacu pada gagasan dari sejarawan Perancis Fernand Braudel, Strange melihat adanya globalisasi pada tingkat *material life*. Yang dimaksud adalah terciptanya struktur produksi global yang menentukan barang dan jasa apa yang dihasilkan oleh negara-negara untuk kelangsungan dan kenikmatan hidup. Produksi barang dan jasa itu berorientasi ke pasar global dan tidak hanya terbatas pada pasar nasional saja. *Kedua* globalisasi juga terjadi pada struktur keuangan. Pembiayaan proses produksi lewat kegiatan investasi kian membutuhkan ruangan yang bersifat global sehingga ada kecenderungan *territorial state* tidak lagi menjadi *space* yang relevan dan memadai untuk strategi investasi.

Senada dengan pendapat di atas, Jusman (2000) mengungkapkan postur globalisasi ekonomi tumbuh dan berkembang dengan empat faktor. *Pertama*, pertumbuhan arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional secara cepat yang

diciptakan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. *Kedua*, gelombang arus modal yang masuk dan ke luar dari suatu wilayah melalui pola *foreign direct investment* (investasi asing langsung) dalam bentuk pertumbuhan kapasitas produksi di satu wilayah, dalam bentuk permesinan baru, pabrik dan kawasan industri baru, yang mendapatkan dukungan perusahaan transnasional. *Ketiga*, gelombang arus modal yang masuk ke suatu wilayah berbentuk *portofolio*, yakni arus uang nyata yang masuk dan keluar satu wilayah ekonomi melalui mekanisme pasar uang, pasar saham, ataupun kredit jangka pendek tumbuh dan berkembang secara eksposional. *Keempat* kecepatan pertumbuhan teknologi terutama teknologi digital yang melahirkan infrastruktur informasi dan komunikasi berbasis satelit melalui jaringan telepon, internet multi media, infrastruktur transportasi kargo dan orang makin efisien dan efektif.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi ekonomi terjadi pada dua sektor yang amat strategis yaitu sektor keuangan dan perdagangan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, globalisasi ekonomi terutama pada sektor keuangan ternyata tidak memberikan keuntungan yang sepadan dengan biaya yang ditanggung negara-negara berkembang tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan diterapkannya prinsip liberalisme keuangan sebagai dampak dari liberalisme keuangan sebagai dampak dari liberalisme ekonomi. Seperti yang ditegaskan oleh Francis Fukuyama (1992) dalam bukunya *The End of History and The Last Man*, bahwa dewasa ini baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang cenderung mengadopsi prinsip-prinsip liberal dalam menata ekonomi domestik maupun global (Jemadu, 2000).

Munculnya ide agar negara-negara berkembang membuka sektor keuangannya secara bebas oleh negara-negara maju, sebenarnya berawal dari kejenuhan dan rendahnya keuntungan yang diperoleh investor

di negara-negara maju. Dan karena itu, mereka membutuhkan pasar investasi baru yang lebih menarik yaitu negara-negara berkembang. Melalui lobi kepada lembaga-lembaga internasional seperti *IMF* dan Bank Dunia akhirnya kepentingan tersebut berhasil didesakkan kepada negara-negara berkembang.

Memang harus diakui, negara-negara berkembang memerlukan dana asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi negaranya. Dengan demikian, dari perspektif ini maka sebenarnya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan oleh adanya liberalisasi keuangan. Namun dalam realitanya, ternyata dana-dana yang masuk ke negara-negara berkembang lebih banyak berbentuk pinjaman jangka pendek dan bermotifkan spekulatif. Akibatnya ketika jatuh tempo untuk membayar cicilan utang dan bunganya, negara-negara peminjam mengalami kesulitan besar.

Terlebih lagi, globalisasi keuangan ini telah mengubah status uang secara mendasar. Mata uang kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pembayaran tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Dalam posisi uang seperti ini, maka pemegang mata uang kuat (*hard currency holder*) yaitu US \$ tentunya harus membayar lebih mahal ketika harus membeli US \$ untuk membayar utang. Terlebih lagi sejak dibekukannya sistem Bretton Woods (1970) dan beralih ke sistem bebas mengambang, menyebabkan fluktuasi nilai tukar tidak menentu.

Tidak hanya sektor keuangan, disektor perdaganganpun globalisasi ini juga menempatkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada posisi yang selalu kalah. *World Trade Organization (WTO)* yang merupakan penjelmaan globalisasi perdagangan, ternyata merupakan alat politik bagi negara-negara maju untuk memaksakan kepentingan perdagangan mereka kepada negara-negara berkembang. Nondiskriminasi (*equality*) yang diharapkan muncul dari kesepakatan (*agreements*) yang

dihasilkan *WTO* ternyata tidak muncul. Sebagai contoh, ketika negara-negara berkembang menghendaki agar negara-negara maju meliberalisasikan sektor pertaniannya, merupakan menolak meratifikasinya. Sebagai misal, ketika bergulirnya *WTO* sejak 1 Januari 1995, Amerika Serikat juga belum berani, meratifikasinya karena mereka masih harus berhitung mengenai posisi untung rugi meliberalkan sektor pertanian.

Posisi lemah negara-negara berkembang dalam mekanisme *WTO* tersebut juga tercermin dalam berbagai substansi kesepakatan. Sejak Putaran Uruguay (cikal bakal *WTO*), negara-negara berkembang selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan hak milik intelektual pertanian, tekstil, perdagangan, jasa dan investasi. Yang menonjol dari semua isu tersebut adalah isu hak milik intelektual atau *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Sementara itu, persoalan yang juga sering merugikan negara berkembang justru bukan berasal dari aturan main *WTO*. Misalnya adanya sistem pembalasan silang yang berasal dari *The US Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*, atau lebih dikenal dengan "Super 301". Hal tersebut merupakan sistem sanksi yang mengaitkan sebuah pelanggaran dengan semua aspek ekonomi secara *al out* dan *at all cost*. Jika sebuah negara melakukan pelanggaran di satu sektor, misalnya *TRIPs*, ia bisa dibalas oleh lawannya di sektor lain. Amerika Serikat pernah menjalankan sistem ini. Misalnya ketika mereka mengancam memperketat kuota tekstil Indonesia, jika kita masih menerapkan kuota film-film Hollywood. Penerapan sistem ini tentunya akan menyebabkan negara-negara berkembang menjadi semakin rentan karena kepentingan ekonomi dan perdagangannya selalu diancam dan diganggu berbagai isu yang sedang dihadapi.

Indonesia kini, setelah secara sistematis melakukan liberalisme perekonomian sejak

1983 dan serentak setelah krisis moneter yang pecah tahun 1997, hampir sempurna berada di bawah kendali IMF, WTO dan Bank Dunia. Tak satupun pemerintah pasca Soeharto, sekalipun yang lahir dari kubu berseberangan dan dilegalisir oleh pemilihan umum yang demokratis dalam sejarah Indonesia di tahun 1999, kuasa untuk melepaskan diri dari kendali IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Dengan berbagai realitas di atas, diperlukan berbagai langkah strategis baik jangka panjang maupun jangka pendek agar Indonesia dapat mengambil posisi yang lebih menguntungkan dalam bidang ekonomi pada era globalisasi. Sunarsip (2001) misalnya menyarankan agar Indonesia mengadakan *adjustment* terhadap liberalisasi sektor keuangan dengan melakukan kontrol terhadap aliran modal. Ide ini disandarkan kepada pendapat Jagdish Bhagwati (1998) seorang profesor dari Columbia University, New York yang mengatakan bahwa sistem devisa bebas tidak cocok. Perdagangan memang harus bebas untuk menaikkan efisiensi, namun mobilitas kapital tidak boleh sebebaskan-bebasnya. Kedua hal itu tidak simetris. Bhagwati menunjuk sistem pengawasan modal yang berhati-hati (*prudential Capital control*). Esensinya ada dua. *Pertama*, otoritas moneter perlu melakukan pemantauan ketat (*close monitoring*) dan review terhadap Utang luar negeri (ULN) jangka pendek dengan mempertimbangkan kemampuan cadangan devisa, kebutuhan serta kemampuan membayar. *Kedua*, Bhagwati menyarankan untuk tidak memperlakukan repatriasi bunga, deviden, dan kekayaan investor asing.

Ide kontrol devisa versi Bhagwati ini layak untuk dikaji sebagai instrumen *adjustment* globalisasi. Di satu sisi ia mengajukan sebuah kontrol yang ketat. Namun di sisi lain ia menganjurkan agar repatriasi kapital dibiarkan. Ide repatriasi ini, paling tidak akan menghilangkan kesan bahwa kontrol devisa akan merugikan. Ini mengingat ide repatriasi ini masih memberikan ruang daya tarik bagi investor asing. Jika ini ditempatkan

minimal kebijakan ini akan memberikan tekanan kepada pasar spekulasi tanpa mengorbankan kepentingan investor asing.

Jemadu (2000), menyarankan, *pertama*, pemerintah jangan sampai terlena dengan pemecahan masalah-masalah ekonomi secara *ad hoc* sambil melupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi nasional. Perlu diingatkan status Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia, dengan resiko bisnis yang tinggi, telah membuat perekonomian menjadi tidak efisien. *Kedua*, Indonesia membutuhkan pengusaha swasta yang mampu mengembangkan teknologi. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tradisi kepeloporan di bidang teknologi ini memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum menunjukkan hasil nyata. Di bawah kepemimpinan rezim orde baru, pemerintah Indonesia hanya membesarkan konglomerat yang bisanya cuma berdagang dan sumber apropiasinya lebih ditunjukkan ke dalam negeri melalui berbagai praktek monopoli dan tidak difokuskan kepada kegiatan ekspor. Kelemahan pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat hanya akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang bermental *free-riders* yang jelas merugikan perekonomian nasional. *Ketiga*, Indonesia memerlukan pendekatan baru dalam menciptakan stabilitas politik yang langgeng. Demokratisasi tidak lagi dipahami secara sempit berupa penciptaan lembaga-lembaga politik modern, tetapi proses menumbuhkan sikap warga negara yang menyadari hak dan tanggung jawabnya serta toleran menghadapi kemajemukan yang ada.

Secara lebih rinci dan pragmatis Aswar Ali (2002), memberikan saran-saran sebagai berikut : 1). Hentikan kerjasama dengan IMF, minimal jangan mengikuti secara membabi buta, tetapi utamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Indonesia tidak untuk diabdikan kepada segelintir orang (IMF, WTO dan Bank Dunia); 2). Hentikan proses penjualan aset BPPN, dan

privatisasi BUMN, yang diarahkan kepada kepemilikan asing, tapi lakukan redistribusi aset pada rakyat sebagai kendaraan dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan daya beli rakyat, agar pasar domestik kondusif untuk *economic recovery*; 3) Laksanakan otonomi daerah dengan sepe-nuh hati, sebelum terlambat. 4). Tegakan keadilan dan hukum dengan memberantas semua bentuk KKN.

Bidang Pendidikan

Proses pendidikan tidak hanya sekedar mempersiapkan anak didik untuk mampu hidup dalam masyarakat kini, tetapi mereka jugaharus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang yang semakin sulit diprediksi karakteristiknya. Rowan Gibson (dalam Suyanto, 2001) menggambarkan betapa sulitnya memprediksi masa depan dalam sebuah ungkapan berikut : The lesson of the last three decadensis that nobody can drive to the future on cruise control.

Kesulitan memprediksi karakteristik masyarakat yang akan datang disebabkan oleh kenyataan bahwa di era global ini perkembangan masyarakat tidak linier lagi. Perkembangan masyarakat penuh dengan diskontinuitas. Gambaran seperti ini secara lebih lugas lagi juga dijelaskan oleh Rowan Gibson (dalam Suyanto, 2001) dalam rangkaian kalimatnya sebagai berikut : The fact is that the future will not be a continuation of the fast. But in order to grab hold of the future we have to late of the fast. We have to challenge and, in many cases, unlean the old mode. The old paradigms, the old rules, the old strategies, the old assumptions, the old succes recieps.

Oleh karena itu, keberhasilan kita masa lalu belum tentu memiliki validitas untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pendidikan masa kini dan masa datang. Dalam bidang pendidikan politik bagi masyarakatpun kita juga tidak perlu mengan-dalkan keberhasilan masa lalu. Bahkan

untuk kondisi saat ini kita perlu merenung-kan secara dalam, dan merefleksikan ungkapan Rowan Gibson yang disebutkan terakhir itu agar ktia mampu melupakan luka lama, menghilangkan dendam-dendam lama, dan belajar meninggalkan paradigma lama, model lama, agar akhirnya kita mampu membangun masa depan secara bersama demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kehidupan global batas-batas negara secara fisik geografis menjadi tidak penting lagi. Justru faktor yang paling penting bagi eksistensi suatu bangsa adalah dikuasainya teknologi informasi. Dengan adanya berbagai penemuan dalam bidang teknologi informasi, kekuasaan negara dalam arti teritorial mejnjadi semakin kabur. Disisi lain dengan teknologi informasi, kita juga dapat membelajarkan diri dalam suatu proses pendidikan yang bersifat maya (*virtual*). Hal ini membawa implikasi bahwa pendidikan nasional kita harus mampu mempersiapkan bangsa ini menjadi komunitas yang terberdayakan dalam mengha-dapi kehidupan global yang semakin lama semakin menggantungkan diri pada teknologi informasi. Kondisi ini akhirnya juga berakibat pada sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan pada pola kehidupan atas dasar prinsip inter-depedensi.

Agar bangsa ini memiliki peran yang signifikan dalam konteks interdepedensi kehidupan, baik yang terjadi dalam skala lokal nasional, regional, maupun global, sistem pendidikan harus mampu memberdayakan masyarakat luas. Salah satu masyarakat yang terberdayakan oleh sistem pendidikan ialah dimiliki unggulan komparatif dan unggulan kompetitif dalam konteks global.

Konsekwensinya pendidikan harus di-konseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses pemberdayaan yang benar-benarr dan harus disadari secara kolektif, yang perlu dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintahan dalam rangka melakukan investasi masa depan

bangsa, bukan sekedar tambal sulam program yang tidak akan mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa akan menjadi realitas dalam kebijakan dan praktis jika masyarakat, keluarga dan pemerintah secara bersama-sama memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencarian solusi bagi semua persoalan dan tantangan pendidikan yang kita hadapi saat ini dan masa yang akan datang.

Interdependensi kehidupan menuntut adanya saling percaya (*mutual trust*) diantara sesama manusia. Oleh karena itu pendidikan nasional harus mampu menanamkan nilai-nilai (*values*) kepada seluruh lapisan masyarakat agar memiliki sikap hidup yang toleran saling mempercayai satu sama lain, sehingga pada akhirnya masyarakat kita memiliki kemampuan hidup dalam berbagai bentuk pluralitas kehidupan.

Dalam sistem kehidupan global seperti saat ini dan dimasa yang akan datang, penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi eksistensi dan perubahan suatu bangsa. Oleh karena itu, dilihat dari aspek relevansi, era global akan berdampak cepat pada cepat usangnya *hardware* dan *software* dalam pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan harus diberdayakan setiap saat, berkelanjutan, dan ber-sistem. Ini semua menurut adanya kemampuan dan niat yang kuat dan pemerintah untuk menjaga tingkat unggulan kompetitif yang tinggi dari semua *outcome* pendidikan nasional.

Untuk menciptakan unggulan kompetitif, kita memerlukan inovasi yang dalam dunia pendidikan. Menjadi bangsa yang berharkat memerlukan kompetitif dalam berbagai bidang. Bukan jamannya lagi kita mengandalkan murahnya tenaga kerja untuk mendukung dan membenarkan konsep unggulan kompetitif. Dalam konteks untuk menciptakan unggulan kompetitif *outcome* pendidikan, patut kiranya kita mengkaji pendapat Michael Porter (dalam Suyanto, 2001) dalam ungkapanannya : ...the ability to

sustain an advantage from cheap labour or even from economies of scale these are the old paradigms. These paradigms are being superseded. Today, the only way to have an advantage is through innovation and upgrading.

Sejalan dengan pendapat tersebut, jika kita ingin menghasilkan berbagai unggulan kompetitif *outcome* pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demikian itu justru akan menjadi beban bagi pencapaian dan peningkatan kualitas *outcome* secara berkelanjutan dan tersistem agar unggulan kompetitif selalu dapat dipertahankan.

Oleh karena itu dalam membangun paradigma baru sistem pendidikan di era global abad ke 21, sektor pendidikan perlu difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa agar kita memiliki unggulan belajar. Konsekwensinya, inovasi adalah wahana pembelajaran menuntut agar semua institusi pendidikan kita mampu menanamkan kemampuan tentang bagaimana belajar untuk belajar bukan belajar untuk menghafal dan belajar untuk kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global dan semakin banyak hal yang dapat dilakukan hanya secara *virtual*.

Kelemahan proses pembelajaran selama ini terlalu menekankan pada aspek kognitif. Dengan penekanan secara berlebihan pada aspek kognitif itu persoalan efektif yang terkait dengan sistem nilai kurang dapat dikembangkan. Hal ini berakibat lemahnya sistem nilai yang dimiliki oleh para peserta didik lemah, akibatnya mereka kurang memiliki visi yang jelas mengenai masa depan mereka. Dengan kata lain, para peserta didik sebagian besar kurang memiliki *sense of crisis*, sehingga mereka kurang menyadari

akan pentingnya memiliki unggulan kompetitif untuk mampu hidup dengan wajar di era global.

Pendidikan nasional, oleh karena itu, perlu menanamkan kesadaran akan perlunya memiliki keunggulan kompetitif di masa yang akan datang agar mereka mampu hidup dalam konteks interdependensi. Tanpa memiliki visi yang jauh kedepan, kita akan terjerembab pada dependensi kehidupan. Jika hal ini terjadi, kita tidak akan mampu menjadi tuan di negeri sendiri, dan dengan demikian tidak tertutup kemungkinan kita justru akan warga negara kelas dua di negeri sendiri.

Mendukung pendapat di atas "Media Indonesia" (22 Juni 2002) memaparkan bahwa menjatuhkan pilihan pada kurikulum internasional sebagai basis pendidikan di Indonesia tampaknya sebagai hal wajar, bahkan dianggap relevan, agar para lulusan dapat menghadapi tantangan global masa mendatang yang dipeenuh persaingan.

Kurikulum pendidikan Indonesia pernah terancam tidak diakui oleh masyarakat internasional misalnya, pada disiplin ilmu kelautan dan insinyur teknik. Hanya karena fasilitas dan sumber daya yang mendukung serta sistem penilaian akreditasi dianggap tidak memenuhi standar internasional. Meski pada akhirnya, kedua bidang subjek materi itu tetap diakui oleh masyarakat internasional setelah diadakan pembenahan.

Kesimpulan

Akar dari globalisasi adalah terjadinya kecepatan pertumbuhan teknologi terutama teknologi digital yang melahirkan infrastruktur informasi dan komunikasi berbasis satelit melalui jaringan telepon, internet, multi media, dan infrastruktur transportasi kargo.

Terjadinya globalisasi tidak bisa dilepaskan dari faktor dominasi kekuasaan. Karena itu, proses globalisasi bermula dari

negara-negara maju atau bangsa-bangsa yang lebih dulu kaya, berkuasa dan maju dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti oleh negara-negara berkembang. Dalam kondisi ini negara-negara berkembang berada dalam posisi yang ditunjukkan oleh IMF, WTO dan Bank Dunia.

Kebijakan bidang moneter dan perdagangan yang lebih realistis dan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang diperlukan agar Indonesia tidak selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan IMF, WTO dan Bank Dunia. Sektor pendidikan memerlukan reorientasi kurikulum yang memadukan wawasan lokal dengan visi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar Ali, (2002), *Ancaman Neo Imperialisme di Era Globalisasi*, Pikiran Rakyat, edisi 2 Maret 2002
- Dedy Supriadi, (1997), *Globalisasi dan Pendidikan*, BMPS Jawa Barat.
- Jemadu, Aleksius, (2000), *Globalisasi, Antara Tantangan dan Peluang*, Kompas Edisi 12 Desember 2000
- Jusman, (2001), *Mengayuh Biduk Konsepsi Berdikari di Tengah Gelombang Arus Globalisasi Ekonomi Abad 21*, Pikiran Rakyat, Edisi 7 Agustus 2001.
- Media Indonesia*, (2002), Kurikulum Internasional untuk Hadapi Globalisasi; Media Indonesia, Edisi 22 Juni 2002.
- Sulastomo, (2000), *Beberapa langkah strategis Menghadapi Globalisasi*, Kompas Edisi 4 Desember 2000
- Sunarsip, (2001), *Meluruskan arah globalisasi*; Republika, Edisi 8 Juni 2001.
- Suyanto, (2001), *Tantangan Pendidikan Hadapi Globalisasi*; Kompas Edisi 16 Mei 2001.